IMPLEMENTASI PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN DALAM PROGRAM PERMAKANAN BAGI KELUARGA MISKIN DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN PROVINSI BENGKULU
(Studi Kasus di Kelurahan Ibul dan Desa Lubuk Tapi Kecamatan Kota Manna)

Fikri Zuharyan
NPP 33.0262
Program Studi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Email: fzuharyan@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Subiyono SH, M.Sc, Ph.D dan Indramayu, S.H., M.H.
Email: indram@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): *This research is motivated by the persistent inaccuracy in targeting of social food assistance to poor families due to suboptimal utilization of population data, weak data synchronization between the Social Service and the Population and Civil Registration Service, and the potential for duplication and exclusion errors.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze the implementation of population data utilization in the food program, identify obstacles that occur, and formulate efforts to ensure the program runs more precisely on target.* ***Method:*** *This study uses a descriptive method with a qualitative approach and George C. Edward III's policy implementation theory, which includes communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data were obtained through interviews, observations, and documentation with informants from the Social Service, the Population and Civil Registration Service, village officials, and aid recipients.* ***Result:*** *The results show that the implementation of population data utilization in the food program has been ongoing but is not optimal. The main obstacles are the lack of socialization, limited human resources and supporting facilities, unsustainable data updates, and weak inter-agency coordination. Despite the commitment of implementers, program implementation still requires strengthening in terms of data verification and oversight.* ***Conclusion:*** *Possible measures include improving data integration between the Population and Civil Registration Office (Disdukcapil) and the Social Services Office (Dinas Sosial), regularly updating the DTKS (Distric Data Data), strengthening cross-sectoral coordination, and ongoing program evaluation to ensure targeted, effective, and accountable distribution of social food assistance.*
Keywords: *policy implementation, population data, food program, social assistance, poor families.*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial permakanan kepada keluarga miskin akibat belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan, lemahnya sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta adanya potensi duplikasi dan exclusion error. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam program permakanan, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan upaya agar program dapat berjalan lebih tepat sasaran. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta teori implementasi kebijakan

George C. Edward III yang meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan dari Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparat desa, serta masyarakat penerima bantuan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam program permakanan telah berjalan namun belum optimal. Hambatan utama terdapat pada kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, pembaruan data yang belum berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi yang masih lemah. Meskipun komitmen pelaksana cukup baik, pelaksanaan program masih memerlukan penguatan pada aspek verifikasi data dan pengawasan. **Kesimpulan:** Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan integrasi data antara Disdukcapil dan Dinas Sosial, pembaruan DTKS secara berkala, penguatan koordinasi lintas sektor, serta evaluasi program secara berkelanjutan agar bantuan sosial permakanan dapat tersalurkan secara tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
Kata kunci: implementasi kebijakan, data kependudukan, program permakanan, bantuan sosial, keluarga miskin.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kemiskinan masih menjadi persoalan krusial dalam pembangunan nasional yang berdampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar pangan. Keluarga miskin menjadi kelompok yang paling rentan terhadap ketidakcukupan gizi dan ketahanan pangan sehingga diperlukan intervensi kebijakan pemerintah melalui perlindungan sosial yang tepat sasaran (Suryahadi & Sumarto, 2021). Kemiskinan dipengaruhi oleh faktor struktural dan sistemik, seperti rendahnya akses terhadap sumber daya ekonomi, modal usaha, lahan produktif, serta lapangan pekerjaan yang layak. Ketimpangan distribusi sumber daya dan kesempatan kerja juga memperparah kondisi kemiskinan karena tidak semua kelompok dapat menikmati hasil pembangunan secara optimal (Hartono, 2021).

Negara Indonesia menempatkan perlindungan sosial sebagai bagian dari kewajiban konstitusional. Bantuan sosial, termasuk program permakanan, merupakan instrumen penting untuk menjamin hak masyarakat miskin agar dapat hidup layak dan memenuhi kebutuhan dasar pangan (Kusuma, 2022). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa ketepatan sasaran menjadi faktor utama keberhasilan program perlindungan sosial. Penelitian Alatas et al. (2012) menemukan bahwa kualitas data dan mekanisme penargetan penerima bantuan sangat menentukan efektivitas program dalam menjangkau kelompok miskin yang benar-benar membutuhkan. Temuan ini menunjukkan pentingnya pemanfaatan data yang akurat untuk mengurangi kesalahan sasaran penerima bantuan.

Fenomena penolakan bantuan sosial oleh sebagian masyarakat tidak selalu menunjukkan penolakan terhadap kebijakan negara, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai moral, identitas diri, rasa malu, harga diri, dan etos kerja yang berkembang dalam kehidupan sosial masyarakat. Individu yang masih mampu bekerja cenderung menolak label “tidak mampu” meskipun memperoleh kesempatan menerima bantuan (Koentjaraningrat, 2009). Program permakanan merupakan kegiatan pemberian makanan berupa nasi atau sejenisnya, lauk-pauk, sayur, buah, dan air mineral sesuai ketentuan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, salah satunya Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Berbagai studi internasional menunjukkan bahwa bantuan pangan memiliki dampak signifikan terhadap kesejahteraan rumah tangga miskin. Hidrobo et al. (2014) menjelaskan bahwa bantuan

pangan, tunai, maupun voucher mampu meningkatkan konsumsi rumah tangga dan memperbaiki kondisi ketahanan pangan penerima manfaat. Sementara itu, DePolt et al. (2009) menemukan bahwa program bantuan pangan berkontribusi dalam mengurangi kerawanan pangan dan kesulitan pemenuhan kebutuhan dasar pada keluarga berpenghasilan rendah. Meskipun tingkat kemiskinan di Provinsi Bengkulu menunjukkan penurunan, persentasenya masih berada di atas rata-rata nasional. Kabupaten Bengkulu Selatan juga masih menghadapi masalah kemiskinan yang cukup tinggi sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat miskin (BPS Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025). Program bantuan sosial permakanan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan akses gizi dan mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin. Selain membantu pemenuhan kebutuhan pangan, program subsidi pangan juga terbukti mampu meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan keluarga rentan apabila dilaksanakan secara berkelanjutan dan tepat sasaran (Black et al., 2012). Oleh karena itu, implementasi yang tepat sasaran menjadi faktor kunci dalam mencapai tujuan program (Putri, 2023).

Namun, implementasi program bantuan sosial masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketidaktepatan sasaran penerima, distribusi yang tidak merata, serta koordinasi antarinstansi yang belum optimal (Hartono, 2021). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh besarnya bantuan yang diberikan, tetapi juga oleh kualitas data penerima dan efektivitas tata kelola program.Peran pemerintah daerah, khususnya Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, menjadi sangat penting dalam memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran. Pemanfaatan data kependudukan yang akurat dapat mendukung proses sinkronisasi data, mencegah duplikasi penerima, serta meminimalkan exclusion error sehingga bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak (Rahayu, 2022).

Penelitian ini difokuskan di Kelurahan Ibul dan Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, yang merupakan wilayah dengan jumlah penerima bantuan sosial permakanan terbanyak. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam program permakanan penting dilakukan untuk menilai efektivitas program, mengidentifikasi kendala, serta merumuskan perbaikan kebijakan agar bantuan sosial benar-benar menjadi instrumen strategis dalam penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Nasution, 2020; Hidayat, 2021; Siregar, 2021).

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (Research Gap)

Penulis berfokus pada permasalahan implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan. Meskipun penelitian terdahulu telah membahas implementasi Program Permakanan bagi lansia miskin, implementasi bantuan sosial dalam pengurangan kemiskinan, serta pemanfaatan data kependudukan dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan pelayanan administrasi kependudukan, masih terdapat keterbatasan kajian yang secara khusus menghubungkan pemanfaatan data kependudukan dengan ketepatan sasaran Program Permakanan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek pelaksanaan program bantuan sosial, kualitas pelayanan administrasi, dan efektivitas distribusi bantuan, sehingga belum mengkaji secara mendalam bagaimana data kependudukan dimanfaatkan sebagai dasar verifikasi, validasi, dan penetapan penerima bantuan permakanan agar terhindar dari kesalahan sasaran, duplikasi penerima, maupun exclusion error.

Selain itu, penelitian terdahulu umumnya dilakukan pada konteks wilayah dan program yang berbeda, seperti Kabupaten Lombok Barat, Desa Banjarbendo, Kota Gorontalo, dan Kabupaten Blitar, sehingga belum memberikan gambaran mengenai kondisi implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan di Kabupaten Bengkulu Selatan. Padahal, berdasarkan kondisi empiris yang ditemukan, masih terdapat permasalahan berupa belum optimalnya sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, keterbatasan pembaruan data, serta potensi ketidaktepatan sasaran penerima bantuan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan tersebut dengan menganalisis implementasi pemanfaatan data kependudukan, mengidentifikasi hambatan yang terjadi, serta merumuskan upaya peningkatan integrasi data agar Program Permakanan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan tepat sasaran bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan.

1.3. Urgensi Penelitian

Berdasarkan penelitian mengenai implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam program permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan, penelitian ini penting dilakukan mengingat masih ditemukannya ketidaktepatan sasaran penerima bantuan sosial akibat belum optimalnya pemanfaatan data kependudukan, lemahnya sinkronisasi data antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta adanya potensi duplikasi data dan exclusion error yang menyebabkan masyarakat yang berhak justru tidak menerima bantuan. Di tengah upaya pemerintah meningkatkan efektivitas program perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan, ketersediaan data kependudukan yang akurat menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penyaluran bantuan. Apabila permasalahan ini tidak segera diteliti dan diperbaiki, maka penyaluran program permakanan berisiko terus mengalami kesalahan sasaran, pemborosan anggaran, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta berkurangnya efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi kependudukan dan implementasi kebijakan sosial, sekaligus menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memperkuat integrasi data, koordinasi antarinstansi, dan ketepatan sasaran program bantuan sosial.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan implementasi program bantuan sosial dan pemanfaatan data kependudukan. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Ira Dewi Haryani (2024) berjudul Implementasi Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal dalam Kondisi Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program permakanan telah berjalan dengan baik dan dinilai tepat sasaran dalam memenuhi kebutuhan dasar lansia miskin. Penelitian tersebut juga menegaskan pentingnya koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam mendukung keberhasilan program. Namun, masih diperlukan peningkatan akurasi pendataan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih optimal. Temuan ini sejalan dengan penelitian Asri dan Fatahilah (2019) yang menyatakan bahwa koordinasi pemerintahan merupakan faktor penting dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan, terutama bagi kelompok rentan administrasi kependudukan. Selain itu, Setiawan (2025) menjelaskan bahwa digitalisasi layanan kependudukan

dapat meningkatkan akurasi data kemiskinan sehingga mendukung efektivitas pelaksanaan program sosial yang lebih tepat sasaran.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Nafilah Dzakiyah Al Azizah dan Isna Fitria Agustina (2025) mengenai Implementasi Bantuan Sosial (Bansos) dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Desa Banjarbendo. Penelitian tersebut menemukan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi antarinstansi, peran pemerintah desa, serta partisipasi masyarakat. Meskipun demikian, masih terdapat hambatan berupa mekanisme monitoring yang belum optimal dan perlunya peningkatan koordinasi antar pihak terkait. Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi bantuan sosial tidak hanya bergantung pada kebijakan yang baik, tetapi juga pada efektivitas pelaksanaannya di lapangan. Hasil tersebut diperkuat oleh penelitian Dewi dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa kegiatan pendataan kemiskinan melalui aplikasi BANGKIT mampu membantu pemerintah desa memperoleh data kemiskinan yang lebih akurat dan mutakhir. Senada dengan itu, Hidayat (2024) mengemukakan bahwa implementasi aplikasi BANGKIT dalam validasi data kemiskinan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas basis data penerima bantuan sosial sehingga dapat meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan.

Selain itu, penelitian Siti Rahma Karnisha Mooduto (2025) tentang Pemanfaatan Data Kependudukan guna Mendukung Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo serta penelitian Fikri Auliya Rahman (2025) mengenai Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Mewujudkan Pelayanan Cepat, Dekat, Ora Ragat di Kabupaten Blitar menunjukkan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketepatan sasaran program dan kualitas pelayanan publik. Kedua penelitian tersebut mengungkapkan bahwa data administrasi kependudukan seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), Kartu Keluarga, dan data domisili menjadi instrumen penting dalam proses verifikasi dan penetapan penerima manfaat. Namun, masih ditemukan kendala berupa pembaruan data yang belum optimal dan kurangnya sinkronisasi antarinstansi. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Wardana dan Saribulan (2023) yang menegaskan bahwa sosialisasi, verifikasi, dan validasi data keluarga miskin secara berkelanjutan merupakan langkah penting untuk menghasilkan data yang akurat dan dapat digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan bantuan sosial. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini berfokus pada implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan, khususnya dalam mendukung ketepatan sasaran penerima bantuan sosial.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian, kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus mengintegrasikan pemanfaatan data kependudukan sebagai instrumen utama dalam implementasi Program Permakanan bagi keluarga miskin, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya yang umumnya hanya menyoroti implementasi bantuan sosial atau pemanfaatan data kependudukan secara terpisah. Penelitian Ira Dewi Haryani (2024) berfokus pada implementasi program permakanan bagi lansia miskin, Nafilah Dzakiyah Al Azizah dan Isna Fitria Agustina (2025) mengkaji implementasi bantuan sosial dalam pengurangan kemiskinan, Siti Rahma Karnisha Mooduto (2025) meneliti pemanfaatan data kependudukan untuk mendukung Program Keluarga Harapan (PKH), sedangkan Fikri Auliya Rahman (2025) mengkaji pemanfaatan data kependudukan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan. Berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut, penelitian ini mengombinasikan teori implementasi kebijakan George C. Edward III dengan analisis korelasi dan sinkronisasi data kependudukan antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Dinas Sosial

dalam menentukan ketepatan sasaran penerima bantuan permakanan. Selain itu, penelitian ini menghadirkan karakteristik objek yang lebih spesifik melalui studi kasus pada Kelurahan Ibul dan Desa Lubuk Tapi sebagai wilayah dengan jumlah penerima bantuan terbanyak di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga menghasilkan model analisis yang lebih komprehensif mengenai peran integrasi data kependudukan dalam meminimalkan kesalahan sasaran, duplikasi data, dan exclusion error pada penyaluran bantuan sosial permakanan.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam program permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan, sehingga dapat diketahui sejauh mana data kependudukan dimanfaatkan dalam mendukung ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial permakanan kepada keluarga miskin

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena bertujuan untuk memahami secara mendalam implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan pada kondisi yang alamiah. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, proses, serta interaksi antarpelaksana program yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2023). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan fokus studi kasus di Kelurahan Ibul dan Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Kota Manna, yang dipilih karena memiliki jumlah penerima bantuan permakanan terbanyak di wilayah perkotaan dan pedesaan. Sumber data terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, sedangkan data sekunder berasal dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan program, serta peraturan yang berkaitan dengan bantuan sosial dan administrasi kependudukan. Informan penelitian meliputi unsur Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, aparat desa/kelurahan, serta masyarakat penerima bantuan, dengan informan kunci berasal dari Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena kedua instansi tersebut memiliki kewenangan utama dalam pengelolaan data kependudukan, verifikasi penerima manfaat, dan pelaksanaan Program Permakanan.

Analisis data dilakukan menggunakan model analisis kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014). Untuk menjamin keabsahan data, penelitian menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga informasi yang diperoleh lebih valid dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2023). Penelitian ini juga menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sebagai pisau analisis dalam mengkaji implementasi program. Kegiatan penelitian dan penyusunan skripsi dilaksanakan selama tahun akademik 2025/2026, mulai dari penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, analisis data, hingga penyusunan laporan penelitian.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Program Permakanan di Kabupaten Bengkulu Selatan

Pelaksanaan pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan. Analisis difokuskan pada proses penggunaan data sebagai dasar penetapan penerima manfaat, mulai dari alur koordinasi antarinstansi, mekanisme verifikasi dan validasi, hingga penyampaian informasi kepada masyarakat. Tujuannya untuk melihat sejauh mana data kependudukan dimanfaatkan secara efektif dalam mendukung ketepatan sasaran program. Pembahasan mencakup empat aspek utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut digunakan untuk menilai keterpaduan antar pelaksana, kecukupan dukungan yang tersedia, sikap dan komitmen aparatur, serta efektivitas prosedur dan tata kelola yang diterapkan sehingga implementasi program dapat dianalisis secara lebih terarah dan menyeluruh.

3.1.1. Komunikasi dalam Pemanfaatan Data

Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan menggunakan pendekatan interaktif dan berjenjang dalam mengelola data. Dinas Sosial memiliki akses tidak langsung namun terintegrasi terhadap data kependudukan Dukcapil melalui pemanfaatan hak akses Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Hak akses tersebut diberikan melalui PKS Nomor: 470/PKS/DUKCAPIL/XI/2024 tentang Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan, dan KTP-el dalam ruang lingkup Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan. DTKS mengintegrasikan data kependudukan dengan kondisi sosial ekonomi penduduk miskin, rentan miskin, dan penerima bantuan sosial.

Verifikasi dan validasi (verivali) dilakukan secara berkala dengan melibatkan pemerintah desa/kelurahan setiap tiga bulan sekali untuk memastikan penerima bantuan benar-benar memenuhi kriteria seperti penyandang disabilitas, lansia tunggal, dan miskin ekstrem. Penetapan dan perbaikan data juga dilakukan melalui Musyawarah Desa (Musdes) dan Musyawarah Kelurahan (Muskel), dengan melibatkan tokoh masyarakat dan perangkat desa dalam proses usulan maupun perbaikan data.

Selain itu, pengelolaan data dilakukan melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang digunakan untuk menginput data kemiskinan, memutakhirkan data, melakukan verifikasi dan validasi penerima bantuan, serta menindaklanjuti data yang sudah tidak layak menerima bantuan. Penerapan SIKS-NG mempermudah pengolahan data kemiskinan secara online dan real-time, meskipun masih terkendala infrastruktur teknologi informasi dan SDM yang terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi dalam pemanfaatan data kependudukan dilakukan melalui mekanisme koordinasi formal seperti perjanjian kerja sama dan rapat koordinasi, serta komunikasi informal antara Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, dan pemerintah desa/kelurahan. Data utama yang dimanfaatkan meliputi:

1. Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas utama verifikasi.
2. Kartu Keluarga (KK) untuk melihat struktur rumah tangga.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai basis penetapan penerima.
4. Status sosial ekonomi (desil kesejahteraan).
5. Data keluarga miskin sebagai prioritas penerima.

Secara empiris, tingkat kesesuaian antara data Dukcapil dan DTKS mencapai sekitar 91%, yang menunjukkan bahwa integrasi data telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya optimal. Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dukcapil menyampaikan bahwa koordinasi data dilakukan setiap tiga bulan sekali antara Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial, dengan tingkat kesesuaian data mencapai sekitar 91%, walaupun masih terdapat perbedaan data domisili dan status sosial. Di sisi lain, komunikasi pada tingkat implementasi bawah belum sepenuhnya efektif, terutama dalam penyampaian kriteria penerima kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial juga menyampaikan

bahwa masih terdapat masyarakat yang merasa berhak menerima bantuan namun belum terdaftar karena data DTKS belum diperbarui.

Gambar 1.
Mind Map Dimensi Komunikasi menurut Edward III

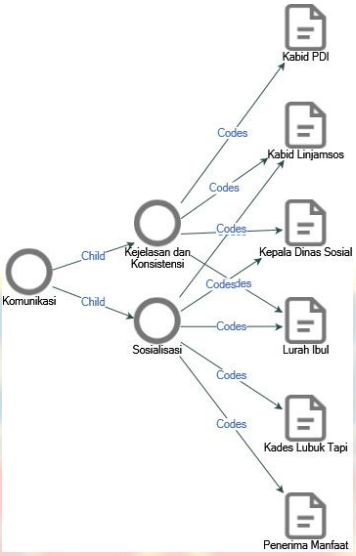

Sumber : Diolah oleh penulis menggunakan Nvivo 15, 2026

Berdasarkan Gambar 1. hasil analisis menggunakan Nvivo 15 menunjukkan bahwa dimensi komunikasi memiliki keterkaitan yang kuat dalam menentukan keberhasilan implementasi Program Permakanan. Efektivitas implementasi dipengaruhi oleh kejelasan informasi, koordinasi antarinstansi, dan sosialisasi kepada masyarakat. Meskipun telah terdapat upaya perbaikan, pelaksanaan komunikasi masih belum optimal sehingga memengaruhi ketepatan sasaran program. Berdasarkan hasil analisis data menggunakan Nvivo 15, ditemukan beberapa kelemahan dalam pola komunikasi, yaitu:

a. Terjadinya distorsi informasi di tingkat desa akibat perbedaan pemahaman terhadap kriteria penerima bantuan.
b. Keterlambatan pembaruan data yang menyebabkan exclusion error (masyarakat layak tidak terdata) dan inclusion error (masyarakat tidak layak justru menerima bantuan).

Dalam perspektif Edward III, kondisi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi belum sepenuhnya memenuhi unsur kejelasan (clarity) dan konsistensi (consistency), sehingga berdampak pada ketidaktepatan sasaran Program Permakanan.

3.1.2 Sumber Daya

Dari aspek sumber daya, implementasi program didukung oleh SDM, teknologi, dan anggaran, namun masih terdapat keterbatasan dalam kualitas pemanfaatan data. Secara teknis, data yang digunakan meliputi:

1. NIK sebagai identitas unik untuk menghindari duplikasi penerima.
2. KK untuk melihat jumlah tanggungan dan struktur keluarga.
3. Alamat untuk menentukan wilayah distribusi bantuan.
4. Status sosial ekonomi (DTKS) sebagai dasar utama kelayakan penerima.
5. Validasi kelurahan/desa untuk memastikan kondisi riil di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial pada 13 Januari 2026, verifikasi data tidak hanya berdasarkan NIK dan KK, tetapi juga melalui validasi lapangan oleh kelurahan dan desa untuk memastikan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya. Dari aspek sumber daya, pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan didukung oleh:

A. SDM Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 41 orang, dengan sekitar 60–72% memiliki kompetensi pengelolaan data.

Tabel 1.

Keadaan Pegawai Dinsos Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat/Golongan/Ruang	Jumlah (Orang)
1.	Pembina Utama Muda (IV/c)	0
2.	Pembina Tk. 1 (IV/b)	3
3.	Pembina (IV/a)	7
4.	Penata Tk. 1 (III/d)	18
5.	Penata (III/c)	7
6.	Penata Muda Tk. 1 (III/b)	4
7.	Penata Muda (III/a)	1
8.	Pengatur Muda Tk. 1 (II/d)	1
9.	Pengatur (II/c)	0
10.	Pengatur Muda (II/a)	1
	Jumlah	41

Sumber: LKJ Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025

Berdasarkan Tabel 1. jumlah pegawai Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 41 orang. Sebagian besar pegawai berada pada golongan Penata Tk. I (III/d), sehingga mendukung pelaksanaan program dan pengelolaan data kependudukan.

B. SDM Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan berjumlah 32 orang. Sekitar 40% operator masih membutuhkan pendampingan dalam pengolahan data digital.

Tabel 2.

Jumlah Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	SMA	-
2	DIPLOMA I	-
3	DIPLOMA II	-
4	DIPLOMA III	5
5	STRATA I (S1/SARJANA)	21
6	STRATA II (S2/MAGISTER)	6
7	STRATA III (S3)	-
Jumlah		**32**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, 2026

Berdasarkan Tabel 2. jumlah pegawai Dukcapil sebanyak 32 orang yang didominasi oleh lulusan Strata I sebanyak 21 orang. Meskipun demikian, masih terdapat sekitar 40% operator yang memerlukan pendampingan dalam pengolahan data digital.

C. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sebagai basis data utama.

SIAK merupakan sistem berbasis teknologi informasi yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menghimpun, mengelola, menyimpan, dan memperbarui data administrasi kependudukan secara terintegrasi. Data yang tercakup meliputi NIK, KK, alamat domisili, status perkawinan, pekerjaan, pendidikan, kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk. Dalam Program Permakanan, SIAK berfungsi sebagai sumber data utama untuk verifikasi calon penerima bantuan, khususnya kelompok rentan seperti lansia terlantar, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. SIAK membantu memastikan ketepatan sasaran, mencegah duplikasi data, mengurangi inclusion error dan exclusion error, serta mendukung transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas penyaluran bantuan.

D. Anggaran

Berdasarkan LKJ Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial memperoleh anggaran sebesar Rp704.296.400 per tahun, sedangkan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (termasuk Program Permakanan) memperoleh Rp528.615.000. Namun, tidak terdapat anggaran khusus untuk proses pemadanan data. Sementara itu, Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan memperoleh anggaran sekitar Rp1,8 miliar per tahun, namun belum tersedia anggaran khusus untuk bidang pemanfaatan data kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid PDI pada 15 Januari 2026, kebutuhan dana pemanfaatan data diajukan sesuai kebutuhan kegiatan.

Tabel 3.

Kondisi Sarana dan Prasarana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Sarana/Prasaran	Jumlah	Kondisi
1.	Gedung Kantor	1	Baik
2.	Ruang Kepala Dinas	1	Baik
3.	Ruang Sekretaris	1	Baik
4.	Ruang Tata Usaha	1	Baik
5.	Ruang Kepala Bidang	1	Baik
6.	Mushola	1	Baik
7.	Toilet	2	Baik
8.	Loket Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1	Baik
9.	Kendaraan Roda 2	3	Baik
10.	Kendaraan Roda 4	2	Baik
11.	AC *(Air Conditioner)*	2	Baik
12.	Dispenser	1	Baik
13.	Wifi	2	Baik
14.	Komputer	15	Baik
15.	Kamera	2	Baik
16.	Mesin Cetak	3	Baik
17.	Kursi Kerja	50	Baik
18.	Kursi Tamu	40	Baik
19.	Meja Kerja	30	Baik
20.	Lemari Kayu	7	Baik
21.	Lemari Besi	3	Baik

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, 2025

Berdasarkan Tabel 3. kondisi sarana dan prasarana Dinas Dukcapil Kabupaten Bengkulu Selatan tergolong baik dan cukup memadai untuk mendukung pengelolaan data kependudukan serta pelayanan administrasi kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam dan observasi lapangan, data dianalisis menggunakan NVivo 15 melalui proses coding untuk mengidentifikasi tema dan hubungan antar konsep yang berkaitan dengan sumber daya, baik sumber daya manusia, informasi, wewenang, maupun fasilitas pendukung.

Gambar 2.
Mind Map Dimensi Sumber Daya menurut Edward III

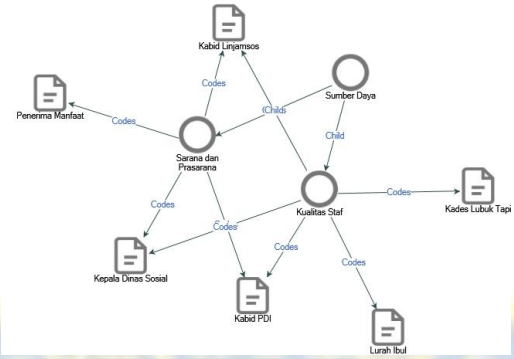

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Nvivo 15, 2026

Berdasarkan Gambar 2 hasil analisis NVivo 15 menunjukkan bahwa dimensi sumber daya dipengaruhi oleh ketersediaan SDM, fasilitas, dan infrastruktur teknologi. Ketiga unsur tersebut menjadi faktor penting dalam mendukung implementasi Program Permakanan, meskipun masih ditemukan berbagai keterbatasan. Setelah dianalisis, ditemukan beberapa keterbatasan, yaitu:

a. Kapasitas SDM dalam pengolahan data masih belum merata.
b. Infrastruktur teknologi belum sepenuhnya mendukung integrasi data secara real-time.
c. Ketergantungan pada pembaruan data manual dari desa dan kelurahan.

Temuan ini sejalan dengan pernyataan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dukcapil Bengkulu Selatan yang menyatakan bahwa sekitar 40% operator masih membutuhkan pendampingan dalam pengolahan data digital. Akibatnya, meskipun data tersedia, pemanfaatannya belum sepenuhnya akurat dan responsif terhadap dinamika sosial ekonomi masyarakat. Dalam teori Edward III, kondisi ini menunjukkan bahwa keterbatasan sumber daya (resources constraint) berdampak langsung terhadap kualitas implementasi kebijakan.

3.1.3. Disposisi

Secara umum, pelaksana menunjukkan sikap yang positif terhadap penggunaan data kependudukan, yang tercermin dari:

a. Komitmen dalam melakukan verifikasi lapangan.
b. Kesediaan melakukan pembaruan data secara berkala.
c. Tingkat realisasi program mencapai ±96,4%.

Data hasil wawancara dan observasi diolah menggunakan Nvivo 15 untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai dimensi disposisi. Hasil pengolahan data tersebut ditampilkan dalam bentuk Word Cloud yang menggambarkan dimensi disposisi.

Gambar 3.
Word Cloud Dimensi Disposisi menurut Edward III



Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Nvivo 15, 2026

Berdasarkan Gambar 3. hasil Word Cloud menggunakan Nvivo 15 menunjukkan bahwa kata Lapangan, Desa, Melalui Data, Sosial, dan Masyarakat muncul sebagai kata yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi di lapangan, yaitu desa dan kelurahan, ditentukan melalui data yang diperoleh dari Dinas Sosial dan Disdukcapil. Selain itu, sikap sosial pelaksana program kepada masyarakat saat melaksanakan tugas turut memengaruhi tercapainya ketepatan sasaran Program Permakanan. Namun, pada pelaksanaannya di lapangan masih terdapat variasi sikap pelaksana, terutama terkait: (1) Ketelitian dalam validasi data, dan (2) Persepsi subjektif terhadap kelayakan penerima.

Temuan ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Sosial dan Lurah Ibul. Kepala Dinas Sosial menyampaikan bahwa komitmen pelaksana tergolong tinggi dengan tingkat realisasi program mencapai 96,4%, namun masih ditemukan variasi kedisiplinan di tingkat lapangan yang terus diperbaiki melalui monitoring rutin. Sementara itu, Lurah Ibul menyatakan bahwa aparatur kelurahan bersikap kooperatif, meskipun masih terdapat keterbatasan waktu dalam pendampingan masyarakat dan masih ada pelaksana yang kurang responsif dalam memperbarui data penerima. Hal ini menunjukkan bahwa disposisi telah mendukung implementasi program, namun belum merata. Menurut Edward III, disposisi yang tidak seragam dapat menyebabkan inkonsistensi dalam pelaksanaan kebijakan.

3.1.4. Struktur Birokrasi dalam Pengelolaan Data Kependudukan

Pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 yang mengatur tahapan penggunaan data secara sistematis dan terkontrol. Tahap awal dimulai dari pengajuan permohonan akses data oleh Dinas Sosial dengan menyertakan tujuan penggunaan serta jaminan keamanan data. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan evaluasi oleh pihak pengelola untuk memastikan kesesuaian kebutuhan data dan kesiapan sistem pengguna. Setelah disetujui, instansi memperoleh hak akses melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang membatasi penggunaan data hanya untuk kepentingan program. Pada tahap operasional, data kependudukan dimanfaatkan untuk verifikasi dan validasi penerima manfaat guna menjamin ketepatan sasaran bantuan.

Tahap akhir berupa pengawasan dan evaluasi untuk menjaga keamanan data serta menilai efektivitas pemanfaatannya dalam mendukung pelaksanaan Program Permakanan secara akuntabel dan tepat sasaran. Struktur birokrasi dalam program ini telah memiliki pembagian tugas yang jelas, yaitu:

a. Dukcapil menyediakan data kependudukan.
b. Dinas Sosial mengolah dan memadankan data dengan DTKS.
c. Desa melakukan verifikasi lapangan.
d. Penetapan penerima dilakukan di tingkat kabupaten.

Secara administratif, perolehan hak akses data kependudukan oleh Dinas Sosial dilakukan melalui mekanisme surat menyurat sesuai Permendagri Nomor 102 Tahun 2019. Proses diawali dengan surat permohonan resmi yang memuat tujuan penggunaan, jenis data yang dibutuhkan, serta jaminan kerahasiaan data. Selanjutnya Dukcapil melakukan verifikasi terhadap kelayakan permohonan. Jika disetujui, kedua pihak menyusun dan menyepakati PKS yang mengatur ruang lingkup pemanfaatan data, hak dan kewajiban, serta perlindungan data. Tahap akhir ditandai dengan penandatanganan PKS dan pemberian hak akses sebagai dasar hukum pemanfaatan data kependudukan.

Gambar 4.
Mind Map Dimensi Struktur Birokrasi menurut Edward III

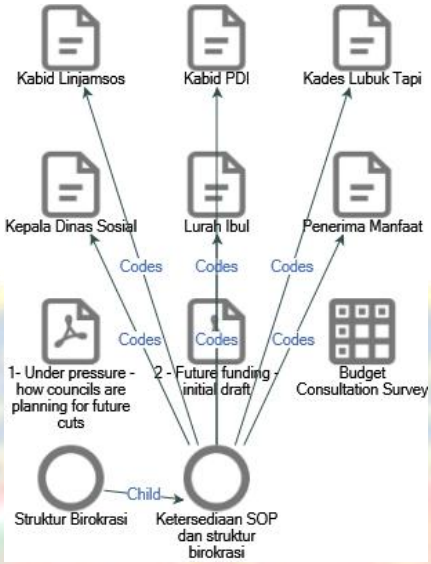

Sumber: Diolah oleh peneliti menggunakan Nvivo 15, 2026

Berdasarkan Gambar 4. hasil analisis menggunakan Nvivo 15 menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia SOP dan alur pelayanan, masih terdapat kendala dalam prosedur administrasi dan pelaksanaan di lapangan. Hal ini menunjukkan bahwa aturan formal perlu diimbangi dengan implementasi yang konsisten dan adaptif. Terdapat tiga kendala utama pada dimensi struktur birokrasi, yaitu: (1) Fragmentasi kewenangan antarinstansi, (2) Perbedaan format dan waktu pembaruan data, (3) SOP yang belum sepenuhnya terstandarisasi di tingkat bawah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dukcapil, pembagian tugas pelaksana sudah cukup jelas, yaitu Dinas Sosial sebagai koordinator, bidang teknis sebagai pelaksana, serta desa/kelurahan sebagai verifikasi final dan distribusi. Namun, perbedaan format data antarinstansi masih sering menyebabkan keterlambatan sinkronisasi data. Selain itu, mekanisme validasi berlapis antara Dukcapil, Dinas Sosial, dan Desa menyebabkan proses menjadi lebih panjang. Menurut teori implementasi kebijakan Edward III, struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat menghambat implementasi. Dalam kasus ini, meskipun struktur sudah jelas, prosedur yang panjang masih mengurangi efisiensi pelaksanaan program.

3.2 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan telah berjalan, namun belum optimal karena masih ditemukan kendala berupa kurangnya sosialisasi, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, pembaruan data yang belum berkelanjutan, serta lemahnya koordinasi antara Dinas Sosial dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Temuan ini sejalan dengan penelitian Siti Rahma Karnisha Mooduto (2025) yang menyatakan bahwa data kependudukan seperti NIK, Kartu Keluarga, dan data domisili merupakan instrumen utama dalam menjamin ketepatan sasaran bantuan sosial, tetapi efektivitasnya masih terhambat oleh data yang belum mutakhir dan sinkronisasi antarinstansi yang belum optimal. Temuan penelitian ini juga sama dengan penelitian Nafilah Dzakiyah Al Azizah dan Isna Fitria Agustina (2025) yang menemukan bahwa keberhasilan program bantuan sosial sangat dipengaruhi oleh kualitas koordinasi dan monitoring pelaksanaan program. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperkuat temuan penelitian sebelumnya bahwa

akurasi data dan koordinasi lintas sektor merupakan faktor penting dalam keberhasilan implementasi program bantuan sosial.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa meskipun komitmen pelaksana program cukup baik, ketepatan sasaran bantuan masih memerlukan penguatan melalui verifikasi data, integrasi sistem informasi, dan evaluasi berkala. Temuan ini berbeda dengan penelitian Ira Dewi Haryani (2024) yang menyimpulkan bahwa implementasi Program Permakanan di Kabupaten Lombok Barat telah berjalan dengan baik dan dinilai tepat sasaran. Perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh karakteristik objek penelitian yang berbeda, di mana penelitian ini berfokus pada pemanfaatan data kependudukan sebagai dasar penetapan penerima bantuan, sedangkan penelitian Ira Dewi Haryani lebih menitikberatkan pada pelaksanaan distribusi bantuan kepada lansia keluarga tunggal miskin. Selain itu, temuan penelitian ini juga memperkuat penelitian Fikri Auliya Rahman (2025) yang menyatakan bahwa data kependudukan memiliki peran strategis dalam meningkatkan ketepatan pelayanan publik. Oleh karena itu, optimalisasi integrasi data kependudukan dengan DTKS serta penguatan koordinasi antarinstansi menjadi langkah penting untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas Program Permakanan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.3 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Temuan menarik dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan pemanfaatan data kependudukan pada Program Permakanan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan data yang akurat, tetapi juga oleh komitmen pelaksana dan dukungan koordinasi antara Dinas Sosial, Disdukcapil, serta pemerintah desa/kelurahan dalam proses verifikasi dan validasi data penerima bantuan. Di sisi lain, faktor penghambat yang masih dominan meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung, pembaruan data yang belum berkelanjutan, serta lemahnya koordinasi antarinstansi sehingga berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Temuan ini menunjukkan bahwa sinergi antarlembaga dan pembaruan data secara berkala menjadi faktor kunci untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas penyaluran bantuan sosial permakanan kepada keluarga miskin.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi pemanfaatan data kependudukan dalam Program Permakanan bagi keluarga miskin di Kabupaten Bengkulu Selatan telah dilaksanakan melalui integrasi data kependudukan dan DTKS, namun belum berjalan optimal karena masih terdapat kendala pada aspek sinkronisasi data, komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi yang menyebabkan ketidaktepatan sasaran bantuan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan integrasi dan pembaruan data secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan kapasitas pelaksana, serta penyederhanaan prosedur agar Program Permakanan dapat tersalurkan secara lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan pada dua lokasi studi kasus, yaitu Kelurahan Ibul dan Desa Lubuk Tapi di Kecamatan Kota Manna, sehingga hasil penelitian belum dapat menggambarkan kondisi seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif yang bergantung pada informasi dari informan dan kondisi saat penelitian berlangsung.

Arah Masa Depan Penelitian (*Future Work*). Penelitian selanjutnya disarankan dilakukan pada wilayah yang lebih luas serta melibatkan lebih banyak lokasi penerima program permakanan. Penelitian mendatang juga dapat mengkaji efektivitas integrasi data kependudukan dan DTKS dalam meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial sehingga diperoleh hasil yang lebih komprehensif dan mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, Pemerintah Kelurahan Ibul, Pemerintah Desa Lubuk Tapi, serta seluruh informan dan pihak yang telah memberikan izin, bantuan, data, dan dukungan selama pelaksanaan penelitian ini sehingga penelitian dapat berjalan dengan baik dan lancar.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Alatas, V., Banerjee, A., Hanna, R., Olken, B. A., & Tobias, J. (2012). Targeting the poor: Evidence from a field experiment in Indonesia. American Economic Review, 102(4), 1206–1240. https://doi.org/10.1257/aer.102.4.1206

Asri, B., & Fatahilah, A. (2019). Koordinasi pemerintahan dalam mewujudkan tertib administrasi kependudukan bagi penduduk rentan administrasi kependudukan. Jurnal Registratie IPDN. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/835

Black, A. P., Brimblecombe, J., Eyles, H., Morris, P., Vally, H., & O'Dea, K. (2012). Food subsidy programs and the health and nutritional status of disadvantaged families in high income countries: A systematic review. BMC Public Health, 12, Article 1099. https://doi.org/10.1186/1471-2458-12-1099

DePolt, R. A., Moffitt, R. A., & Ribar, D. C. (2009). Food stamps, temporary assistance for needy families and food hardships in three American cities. Pacific Economic Review, 14(4), 445–473. https://doi.org/10.1111/j.1468-0106.2009.00462.x

Dewi, N. O. P., dkk. (2024). Pengabdian masyarakat melalui pendataan kemiskinan menggunakan aplikasi BANGKIT di Desa Garawastu. Civitas Consecratio, 4(2), 153–166. https://ejournal.ipdn.ac.id/cc/article/view/4965

Fikri Auliya Rahman. (2025). Pemanfaatan Data Kependudukan dalam Mewujudkan Pelayanan Cepat, Dekat, Ora Ragat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar Provinsi Jawa Timur. http://eprints.ipdn.ac.id/

Hartono, B. (2021). Kebijakan Perlindungan Sosial di Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hidayat, M. R. R. (2024). Implementasi aplikasi BANGKIT dalam validasi data kemiskinan di Kabupaten Majalengka. Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah (JAPD). https://ejournal.ipdn.ac.id/JAPD/article/view/4593

Hidayat, R. (2021). Manajemen Program Sosial dan Implementasi di Daerah. Bandung: Alfabeta.

Hidrobo, M., Hoddinott, J., Peterman, A., Margolies, A., & Moreira, V. (2014). Cash, food, or vouchers? Evidence from a randomized experiment in northern Ecuador. Journal of Development Economics, 107, 144–156. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2013.11.009

Ira Dewi Haryani. (2024). Implementasi Program Permakanan bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal Dalam Kondisi Miskin di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat. https://repository.ummat.ac.id

Koentjaraningrat. (2009). Pengantar Ilmu Antropologi. Jakarta: Rineka Cipta.

Kusuma, A. (2022). Bantuan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat. Yogyakarta: Gadjah Mada University.

Miles, Matthew B., Huberman, A. Michael, & Saldana, Johnny. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Edisi Ke-3. Thousand Oaks, CA: Sage Publications. (Edisi asli 1994).

Nafilah Dzakiyah Al Azizah dan Isna Fitria Agustina. (2025). Implementasi Bantuan Sosial (Bansos) dalam Upaya Pengurangan Kemiskinan Desa Banjarbendo. Volume 8 Nomor 1 (February-April 2025), pp.322-331. https://doi.org/10.35817/publicuho.v8i1.670

Nasution, M. (2020). Solidaritas Sosial dalam Program Bantuan Pemerintah. Medan: USU.

Putri, A. (2023). Analisis Implementasi Program Permakanan di Daerah. Bengkulu: UNIB.

Rahayu, S. (2022). Governansi Bantuan Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana.

Setiawan, I. (2025). Inovasi digitalisasi layanan kependudukan sebagai upaya peningkatan akurasi data kemiskinan dan efektivitas program sosial di Kabupaten Klaten. Jurnal Registratie IPDN. https://ejournal.ipdn.ac.id/jurnalregistratie/article/view/5570

Siregar, F. (2021). Pembangunan Inklusif dan Pemberdayaan Sosial. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Siti Rahma Karnisha Mooduto. (2025). Pemanfaatan Data Kependudukan guna Mendukung Program Keluarga Harapan di Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo. http://eprints.ipdn.ac.id/

Sugiyono, P. . (2023). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Suryahadi, A., & Sumarto, S. (2021). "Reformasi Program Bantuan Sosial di Indonesia: Tantangan dan Peluang". Jurnal Ekonomi Pembangunan. Vol 26 (4): 320-340.

Wardana, M. S., & Saribulan, N. (2023). Sosialisasi, verifikasi dan validasi data dalam pendataan keluarga miskin pada aplikasi Kelurahan On Mobile (KELOM) di Kelurahan Sumelap Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya. Jurnal Pengabdian IPDN. https://ejournal.ipdn.ac.id/JP/article/view/3550